

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam membangun kekuasaan negara yang lahir melalui kehendak rakyat dan digunakan berdasarkan keinginan rakyat, dimana kehendak rakyat itu salah satunya melalui pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu sebagaimana dalam ungkapan (Anggreyni, 2019) bahwa prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah bahwa setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Politik identitas ini muncul karena ada beberapa kesamaan politik misalnya adanya kesamaan agama, etnis, budaya, marga, ideologi, gender dan lain-lai sebagai akumulasi dari adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan di antara berbagai individu. Politik identitas ditingkat lokal ditandai dengan munculnya gerakan kedaerahan yang melingkupi setting etnisitas, ideologi, basis agama serta politik lokal. Ditengarai bahwa politik identitas seringkali digunakan sebagai simbol untuk menentukan basis, kekuatan maupun modal sosial untuk memperoleh kekuasaan politik.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Kota Ambon, sering kali diwarnai oleh penggunaan simbolisme politik identitas sebagai strategi untuk meraih dukungan politik. Kota Ambon, dengan sejarah konflik antar-etnis yang cukup kompleks, menawarkan konteks yang menarik untuk memahami bagaimana identitas lokal dimobilisasi dalam proses politik lokal. Sejarah konflik

antar-etnis di Kota Ambon menciptakan dinamika politik yang unik, meskipun upaya rekonsiliasi telah dilakukan sejak konflik Maluku pada tahun 1999-2002, identitas agama dan etnis masih menjadi faktor yang signifikan dalam politik lokal (Aditjondro, 2019). Konflik tersebut menciptakan ketegangan antar kelompok etnis dan agama yang masih terasa hingga saat ini.

Politik Identitas merupakan salah satu cara dan situasi berpolitik yang biasanya didasari oleh kesamaan atas latar belakang seperti suku, ras, agama, dan gender yang mempertemukan antara individu sebab karena rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Nuansa agama, etnisitas, ideologi, serta kepentingan lokal sering kali menjadi momok para elit politik di Indonesia. Organisasi gerakan sosial” seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka (GPM), dan Gerakan Darul Islam (DI) serta masih banyak lainnya yang menjadi peristiwa sejarah atas nuansa politik identitas karena adanya keluhan kesah yang muncul.

Sejarah politik identitas di Kota Ambon dimulai sejak kedatangan Portugis dan Belanda pada abad 16. Bangsa Portugis menyebarkan agama Kristen di Kota Ambon dan menimbulkan konversi agama yang kemudian berakibat adanya pembelahan pada masyarakat. Selain itu politik identitas merupakan akibat politik *divide et impera* (politik adu domba) yang berimplikasi memunculkan konflik horizontal. Perihal ini dipertegas oleh Belanda dengan membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok (berdasarkan etnis, agama, suku dan ras) serta memberikan keistimewaan terhadap pihak-pihak tertentu sehingga memicu meningkatnya politik identitas. Implikasinya meningkatkan ketegangan antar kelompok yang mengarah kepada konflik (Schwarz, A, 1994; Colombijn, F, 1994; Barton, G, 2002; Hessel, J, 2004).

Pada saat yang sama, Portugis dan Belanda juga turut mewarnai pengaruh agama dan etnis dalam struktur masyarakat Kota Ambon. Pengaruh tersebut justru mewarnai interaksi dalam kehidupan antar kelompok dalam masyarakat antara lain pengaruh agama: Portugis membawa agama Kristen Katolik, sedangkan Belanda membawa agama Kristen Protestan, penyebaran agama ini memicu konversi dan pembelahan dalam masyarakat, antara yang memeluk Kristen dan Islam, Perbedaan agama memicu ketegangan dan konflik antar kelompok, seperti pada masa RMS (Republik Maluku Selatan). Sementara pengaruh etnis adalah : Belanda membagi masyarakat Kota Ambon berdasarkan etnis, seperti Ambones, Alifuru, .Lease, dll. Pembagian ini memperkuat identitas etnis dan memicu ketegangan antar kelompok., ketegangan etnis sering kali dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Politik identitas pasca-penjajahan juga berlanjut pada masa kemerdekaan yang terkait erat dengan isu agama dan politik yang ditopang dengan munculnya RMS sehingga memperparah polarisasi dan konflik. Puncak dampak politik identitas yang sangat dikenang pada Kota Ambon terjadi pada tahun 1999, yakni terjadinya tragedi kemanusiaan. Tragedi ini merupakan puncak dari politik identitas yang telah berlangsung lama di Kota Ambon yang didasarkan pada agama, etnis, dan adat istiadat, telah menciptakan polarisasi dan ketegangan antar kelompok masyarakat (Barton, G, 2002; Hessel, J, 2004).

Konteks yang lain agama seringkali dijadikan simbol kekuatan politik tertentu yang memberi instrument politik sebagai kelompok yang eksklusif. Dalam pandangan (Huntington, 2000) yang menerangkan identitas primordial menjadi aspek penting dalam benturan-benturan antar peradaban. Di wilayah yang

menjadikan agama termasuk mejadi urusan pemerintahan, seringkali kepercayaan atau agama dijadikan dasar kekuatan untuk intervensi kepada kelompok yang berbeda. Politik identitas bisa diibaratkan pedang bermata dua didalam negara Republik Indonesia ini, karena dapat berdampak negatif ataupun positif.

Identitas tidak hanya berbicara tentang sosiologis, tetapi juga ranah politik. Sebagai contoh, putra daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah akan lebih mudah untuk memenangkan sebuah kontestasi demokrasi kepala daerah didaerahnya, sebab karena putra daerah yang juga beretnis sama dan seagama dengan pemilihnya memiliki kekuatan dan basis massa yang loyal terhadap agama, etnis maupun simbol-simbol lokal lainnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilindungi undang-undang secara tidak langsung melahirkan pergerakan yang berlandaskan dari suku, jender dan agama. Sehingga “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan negara sangat tepat karena Indonesia merupakan negara “multikultural” yang banyak etnis, suku, agama, ras dan budaya. Pada tahun 2010 berdasarkan data BPS, di Indonesia terdaftar 1211 bahasa dengan perincian bahasa daerah berjumlah 1158, terdapat 1340 suku. Suku Jawa adalah yang paling besar dengan persentase 41% dari jumlah populasi yang ada. (Syauqi, 2022).

Munculnya segmentasi di masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan warna politik dari pendukung masing-masing sehingga memberikan desakan kepada pihak yang berwajib. Seruan terhadap pemilih untuk tidak memilih kepala daerah nonmuslim (bagi yang muslim) dan tidak memilih kepala daerah yang muslim bagi yang non muslim sering terjadi. Sentimen suku dan agama masuk kedalam paket yang sama. Politik identitas merupakan politik pembelahan dan politik pengelompokan yang akan lebih efektif dalam memobilisasi para pemilih.

Akan tetapi hal tersebut membutuhkan perangkulan satu kelompok dan berupaya untuk menjatuhkan kelompok lainnya (Supriatma, 2009).

Berdasarkan data statistik, Kota Ambon merupakan mikrokosmos dari masyarakat yang sangat multikultural dimana penduduknya dihuni oleh beragam etnis: Ambon, Lease, Seram, Buru, Alifuru, Tual yang merupakan simbol kemalukuan, serta etnis pendatang antara lain: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Cina dan lain-lain yang merupakan bukti nyata bahwa wilayah Ambon merupakan episentrum politik multikultural, sehingga setiap hajatan politik selalu terjadi segregasi politik. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Provinsi Maluku berdasarkan agama sebagaimana dijabarkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.**Data Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Berdasarkan Agama**

NO	Kabupaten/ Kota	Islam	Persentase	K. Protestan	Persentase	K. Katolik	Persentase	Hindu	Persentase	Budha	Persentase
1	Ambon	136.783	13,26	161.055	23,46	22.777	10,87	385	2,45	347	18,11
2	Tual	70.975	6,88	15.413	2,24	12.565	6,00	76	0,48	-	-
3.	Kab. Maluku Tengah	223.715	21,69	165.660	24,13	4.558	2,18	3.858	24,58	328	17,11
4.	Kab. Maluku Tenggara	45.646	4,42	27.544	4,013	65.455	31,23	1.188	7,56	-	-
5.	Kab. SBT	126.537	12,66	3.944	0,57	2.044	0,98	857	5,57	475	24,79
6.	Kab. SBB	199.073	19,30	93.739	13,66	3.716	1,77	215	1,37	-	-
7	Kab. Kep. Aru	42.428	4,11	57.032	8,31	8.904	4,24	68	0,43	27	1,41
8	Kab. MBD	1.470	0,14	71.663	10,44	1.253	1,00	122	0,78	-	-
9	Kab. Buru Selatan	51.410	4,98	14.673	2,14	1.062	0,51	2.378	15,15	-	-
10	Kab. Buru	124.233	12,04	4.540	0,66	2.540	1,21	6.421	40,91	364	19,00
11	Kab. Kep. Tanimbar	9.317	0,93	71.097	10,35	84.679	40,41	122	0,78	127	6,62
	Jumlah	1.031.587	100	686.340	100	209.553	100	15.696	100	1.916	100

Sumber: Kantor Kementerian Agama, Provinsi Maluku, (2022)

Distribusi penduduk di Kota Ambon berdasarkan agama menunjukkan pola sebaran yang tidak merata. Mayoritas penduduk beragama Islam terpusat di Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon, dan Nusaniwe, sedangkan umat Kristen lebih banyak bermukim di Kecamatan Nusaniwe, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan. Dominasi partai-partai sekuler, terutama PDI Perjuangan (PDI-P) yang identik dengan perlawanan terhadap Orde Baru, dalam berbagai pemilu dan pemilihan walikota Ambon mencerminkan fenomena ini. Keberadaan PDI Perjuangan di Kota Ambon memiliki hubungan erat dengan komunitas Kristen di wilayah tersebut, dan hal ini tercermin dalam peta politik lokal. Meskipun partai-partai sekuler, seperti PDI-P dan Golkar, masih mendominasi perebutan kursi DPRD, dinamika politik Kota Ambon juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pilkada Walikota.

Pilkada ini menjadi ajang pertarungan ideologi dan kepentingan, serta mewarnai lanskap politik lokal. Semarak Pilkada Walikota Ambon yang digelar pada Februari 2017 sudah terasa beberapa waktu sebelumnya. Spanduk dan baliho para kandidat Walikota dan Wakil Walikota menghiasi sepanjang jalan, mulai dari Bandar Udara Pattimura hingga Desa Latuhalat di ujung Kota Ambon.

Pemilihan Walikota Ambon yang digelar pada 15 Februari 2017 menghadirkan dua pasangan calon yang siap memperebutkan kursi kepemimpinan.:

1. Richard Louhenapessy, SH - Syarif Hadler (PAPARISA): Pasangan nomor urut satu ini diusung oleh koalisi Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Richard Louhenapessy, sang petahana, kembali maju bersama Syarif Hadler untuk periode kedua.

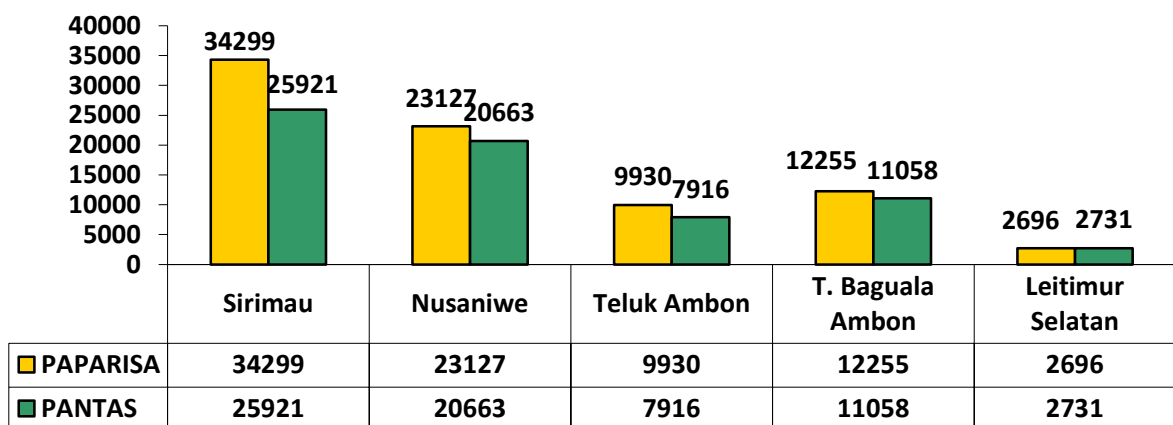
2. Drs Paulus Kastanya, M.Si dan Muhamad Armyn. S. Latuconsina, ST. MT (PANTAS): Pasangan nomor urut dua ini diusung oleh berbagai partai, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara itu, pasangan nomor urut dua, Drs Paulus Kastanya, M.Si dan Muhamad Armyn. S. Latuconsina, ST. MT (PANTAS), mendapatkan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
4. Partai Demokrasi Kesatuan Rakyat (Demokrat)
5. Partai Bulan Bintang (PBB)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
9. Partai Keadilan Sosial (PKS)

Hasil perolehan suara per kecamatan dalam Pilkada Ambon 2017 dapat dilihat pada Diagram 1.1.

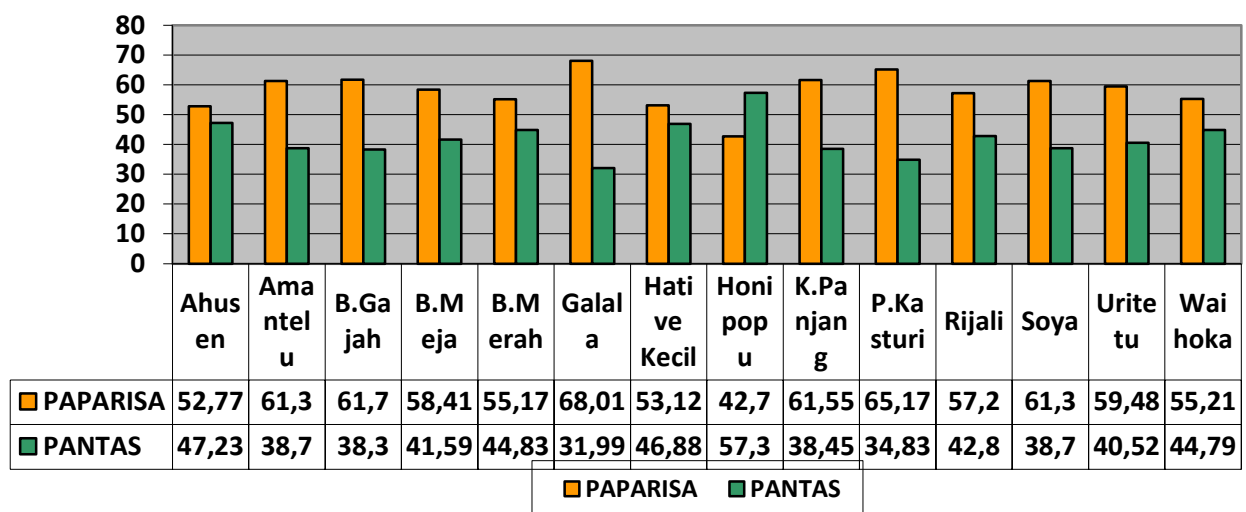
Grafik 1.1. Hasil perhitungan suara per kecamatan di Kota Ambon



Sumber: pilkada 2017.kpu.go.id

Muhamad Armyn. S. Latuconsina, atau yang lebih dikenal dengan sebutan SAM, diyakini memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat Batumerah. Hal ini didasari oleh kesamaan etnis, di mana sebagian besar penduduk Batumerah berasal dari etnis Pelauw, yang merupakan etnis SAM Latuconsina. Kedekatan ini dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendorong perolehan suara signifikan SAM di Kecamatan Sirimau, seperti yang terlihat pada Grafik 1.2

Grafik 1.2. Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Sirimau



Sumber: Data KPU Kota Ambon, (2022)

Kelurahan Kudamati, yang terletak di wilayah Kecamatan Nusaniwe, memiliki sejarah sebagai daerah dengan penduduk yang heterogen, terdiri dari warga Muslim dan Kristen yang hidup berdampingan secara damai. Namun, seiring waktu, terjadilah konflik sara yang menyebabkan segregasi di antara penduduk desa tersebut. Selama masa konflik, banyak penduduk, terutama warga Muslim, mulai berpindah ke lingkungan yang seagama demi keamanan, mengakibatkan desa tersebut mengalami segregasi berdasarkan agama.

Dalam konteks politik identitas, Paulus Kastanya menjadi simbol penting bagi Kelurahan Kudamati. Sebagai calon Walikota dari pasangan PANTAS, Paulus Kastanya memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan warga Kelurahan Kudamati karena berasal atau berdomisili di daerah tersebut. Pengalamannya sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan partisipasinya dalam Pilkada Kota Ambon membuatnya memiliki rekam jejak yang dikenal oleh masyarakat setempat.

Pada Pilkada Kota Ambon tahun 2012, Paulus Kastanya bertarung namun kalah dari pasangan Richard-SAM. Namun, pada Pilkada Kota Ambon tahun 2017, Paulus Kastanya kembali mencalonkan diri, kali ini berpasangan dengan SAM Latuconsina. Dalam pemilihan ini, pasangan PANTAS berhasil memenangkan dukungan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Kudamati.

Pasangan PANTAS berhasil mendapatkan 52,83 persen suara, mengungguli rival mereka, PAPARISA, yang memperoleh 47,17 persen suara. Hasil ini mencerminkan pengaruh kuat faktor kedekatan emosional dan identitas lokal dalam menentukan pilihan pemilih di Desa Kudamati. Masyarakat cenderung memilih pasangan PANTAS karena merasa memiliki kedekatan emosional dengan Paulus Kastanya yang dikenal sebagai bagian dari komunitas mereka.

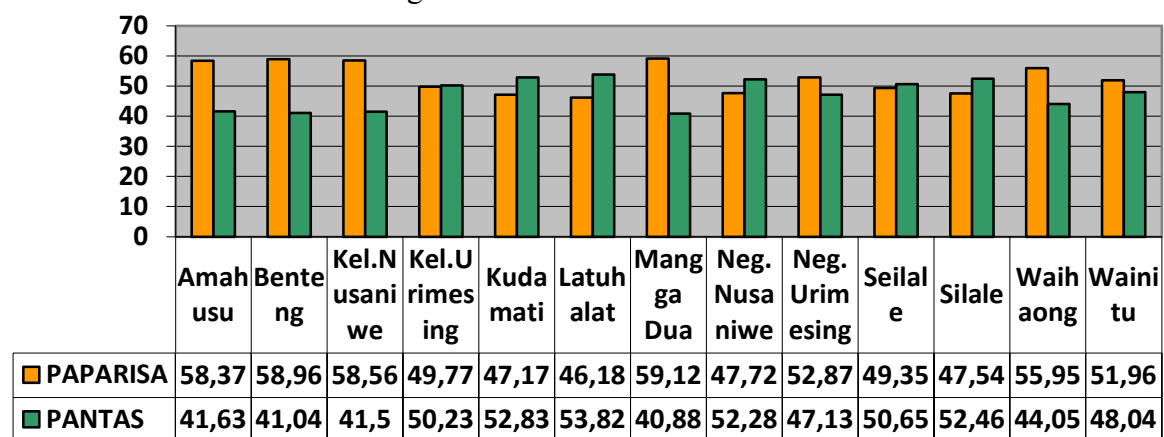
Kemenangan pasangan PANTAS di Kelurahan Kudamati dapat dikaitkan dengan beberapa faktor kunci:

1. Rekam Jejak Paulus Kastanya: Pengalaman dan jasa Paulus Kastanya di bidang sosial dan politik membuatnya dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

2. Pengalaman Politik: Kehadiran SAM Latuconsina sebagai mantan Wakil Walikota juga memperkuat posisi pasangan PANTAS.
3. Kedekatan dengan Isu-isu Lokal: Paulus Kastanya dianggap memahami dan peduli terhadap isu-isu yang dihadapi oleh warga Kelurahan Kudamati.

Namun, meskipun pasangan PANTAS menang di basis geopolitiknya di Kelurahan Kudamati, kemenangan ini tidak tercermin secara keseluruhan di Kecamatan Nusaniwe. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor kedaerahan dan kedekatan emosional memiliki pengaruh besar di tingkat lokal, faktor-faktor lain mungkin berperan di tingkat yang lebih luas. Data perolehan suara disajikan pada grafik 1.3.

Grafik 1.3. Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Nusaniwe

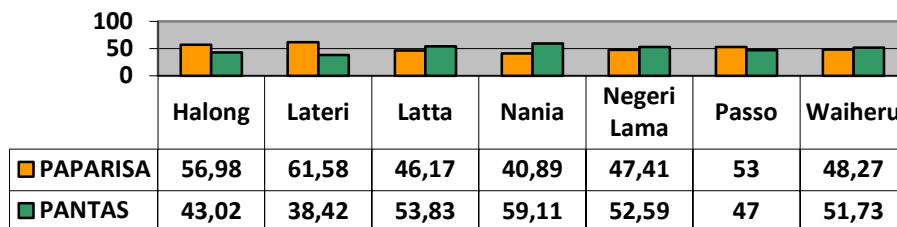


Sumber: Data KPU Kota Ambon, (2022)

Kecamatan Teluk Ambon Baguala memiliki persebaran penduduk yang beragam. Desa Passo memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Desa Latta memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan, diikuti oleh Islam dan Kristen Katholik. Meskipun pasangan PANTAS menang di basisnya di Kecamatan Nusaniwe karena faktor kedaerahan, perbedaan dinamika politik antar kecamatan menunjukkan pentingnya simbol politik identitas berdasarkan karakteristik setiap wilayah. Berikut adalah simbol-

simbol politik identitas dalam kampanye di Kecamatan Teluk Ambon Baguala antara lain : *Agama*: Pasangan calon menggunakan simbol agama yang sesuai dengan mayoritas penduduk, seperti simbol Kristen Protestan., *Kedaerahan*: Pasangan calon menggunakan simbol kedaerahan, seperti nama desa atau adat istiadat setempat, untuk menarik dukungan dari penduduk desa-desa adat tertentu. *Kebudayaan*: Pasangan calon menggunakan simbol kebudayaan, seperti tarian tradisional atau pakaian adat, untuk menunjukkan rasa hormat terhadap budaya setempat. Adapun perolehan suara tergambar pada grafik 1.4.

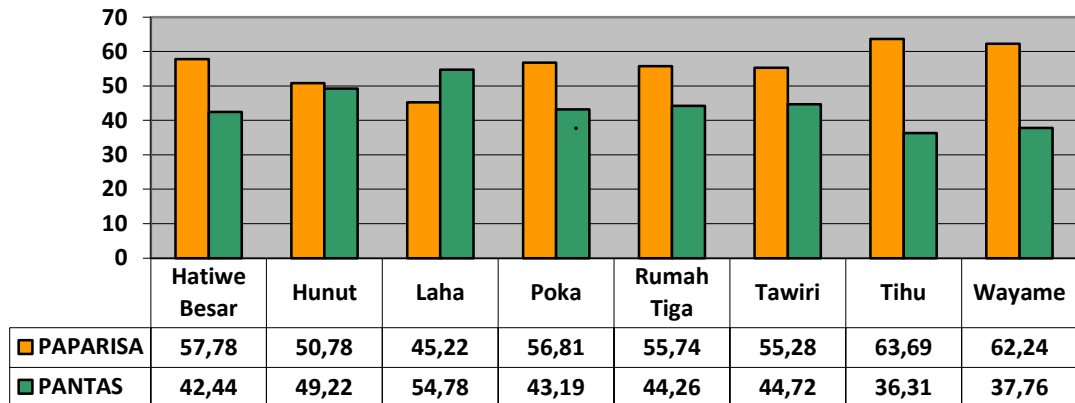
Grafik 1.4. Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Baguala



Sumber: Data KPU Kota Ambon, (2022)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan kemenangan PPARISA di Desa Passo dengan perolehan suara 53%, dengan didasari oleh kesamaan agama antara lain : *homogenitas agama*: Desa Passo merupakan daerah tersegregasi dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Hal ini memungkinkan PPARISA memanfaatkan kesamaan agama ini untuk menarik suara pemilih. Kedua : *Simbol Agama*: PPARISA mungkin menggunakan simbol-simbol agama Kristen dalam kampanyenya, seperti menghadiri kebaktian gereja atau menggunakan atribut agama, untuk memperkuat solidaritas dengan pemilih. Ketiga : *Politisasi Agama*: PPARISA juga menggunakan isu-isu agama dalam kampanye untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Kristen di Desa Passo. : Data perolehan suara dapat dilihat pada grafik 1.5.

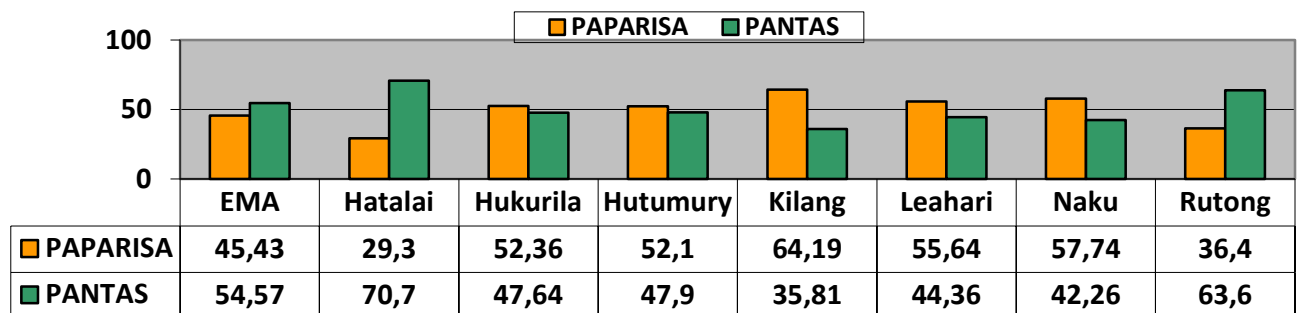
Grafik 1.5. Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Teluk Ambon



Sumber: Data KPU Kota Ambon, (2022)

Pada Kecamatan Leitimur Selatan, ada dominasi agama Kristen: mayoritas penduduk di Kecamatan Leitimur Selatan beragama Kristen Protestan. Kemudian Pengaruh Agama: Faktor agama berperan dalam keputusan pemilih, seperti identitas agama kandidat, pesan kampanye bernuansa agama, dan preferensi terhadap kandidat seiman. Dengan demikian maka Faktor lokal dan keunikan setiap wilayah memiliki pengaruh terhadap simbol politik identitas dan keputusan pemilih. Adapun data perhitungan suara tersaji pada grafik 1.6.

Grafik 1.6. Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Leitimur Selatan.



Sumber: Data KPU Kota Ambon, (2022)

Paulus Kastanya, sebagai calon yang berasal dari daerah tersebut, memperoleh dukungan suara yang cukup besar di Kecamatan Leitimur Selatan. Kedekatan asal-usul dan etnis menjadi poin penting dalam strategi kampanye

Paulus Kastanya, yang dapat memberikan kesan personal dan keakraban dengan masyarakat setempat. Namun, dari data hasil perolehan suara di Kecamatan Leitimur Selatan, terlihat bahwa faktor kedekatan etnis tidak selalu menjadi penentu tunggal. Meskipun PANTAS unggul secara keseluruhan di kecamatan tersebut, ada desa-desa tertentu yang memenangkan suara untuk pasangan PAPARISA, meskipun memiliki kedekatan etnis.

Desa Kilang menjadi menjadi salah satu objek penelitian dan menarik perhatian karena di sana pasangan PAPARISA memenangkan suara. Ini menunjukkan bahwa dalam dinamika politik setempat, faktor-faktor lain seperti citra kandidat, program kampanye, dan dinamika lokal dapat menjadi penentu penting. Ada dinamika dan isu lokal yang lebih dominan di Desa Kilang yang membuat pemilihnya lebih memilih pasangan PAPARISA meskipun memiliki kedekatan etnis dengan Paulus Kastanya.

Dalam Pilkada Kota Ambon 2017, simbolisme politik identitas memainkan peran signifikan. Para kandidat menggunakan simbol-simbol etnis dan agama sebagai bagian dari skenario kampanye untuk meraih dukungan pemilih. Misalnya, beberapa kandidat berusaha menonjolkan identitas religius mereka dalam upaya meraih dukungan dari kelompok agama tertentu. Studi oleh (Saputri, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan simbol agama dalam kampanye politik dapat meningkatkan loyalitas pemilih dari kelompok agama yang sama.

Strategi ini tidak hanya terbatas pada aspek visual, seperti penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam materi kampanye, tetapi juga mencakup retorika dan narasi yang menekankan kesamaan identitas dengan pemilih. Penelitian (Indrawan, 2021) menemukan bahwa narasi politik yang menonjolkan identitas

etnis dan agama dapat memperkuat ikatan emosional antara kandidat dan pemilih, sekaligus meningkatkan polarisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa simbolisme politik identitas bisa menjadi dua sisi yang berbeda, yang di satu sisi bisa meningkatkan dukungan politik, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan ketegangan sosial.

Pemahaman mendalam tentang penggunaan simbolisme politik identitas dalam Pilkada Kota Ambon 2017 penting untuk memahami dinamika politik lokal di Indonesia. Penggunaan identitas dalam politik tidak hanya merefleksikan strategi pragmatis untuk memenangkan suara, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sosial yang mendasari hubungan antar kelompok di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji lebih jauh bagaimana simbolisme politik identitas digunakan dalam Pilkada Ambon 2017 dan implikasinya terhadap keberlanjutan simbolisme identitas pada setiap pemilihan Walikota Ambon pada masa yang akan datang

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi menyoroti bahwa penggunaan simbolisme identitas agama dan etnis dapat memengaruhi preferensi pemilih dan hasil akhir pemilihan kepala daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa para pemilih cenderung lebih condong memilih kandidat yang mewakili atau dianggap memiliki kesamaan identitas agama atau etnis dengan mereka. Dengan demikian, para kandidat secara strategis memanfaatkan identitas agama dan etnis sebagai alat untuk memperluas basis dukungan mereka dan memperoleh keuntungan elektoral (Wahyudi, (2018)

Pemanfaatan simbol agama dalam proses mobilisasi politik tidak sekedar dilakukan oleh kontestan Pilkada beserta dengan para pendukung tetapi juga

digunakan oleh partai politik sebagai institusi. Penggunaan politik identitas yang efektif dalam mencapai tujuan elektoral merupakan komplemen atau bahkan substitusi bagi lemahnya kapasitas partai dalam menggerakkan masa. Penggunaan politik identitas untuk mobilitas politik elektoral sering dikemas dalam ekspresi yang beragam seperti untuk menentang ketidakadilan, diskriminasi, pemurnian agama maupun mencari pemimpin yang baik dikalangan sendiri. Penggunaan politik identitas dalam memperoleh dukungan elektoral telah menegaskan kekekuatan ideologi ataupun program-program yang seharusnya menjadi dasar untuk menentukan pilihan atau preferensi.

Kuasa simbolisme politik identitas juga dapat melemahkan demokrasi lokal. Penggunaan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Ambon juga menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan politik identitas berpotensi merusak konsolidasi demokrasi dan memicu polarisasi masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, muncul adanya stigma dampak negatif politik identitas dalam konsolidasi demokrasi antara lain : a) Melemahkan demokrasi: Politik identitas dapat mengalihkan fokus dari isu-isu penting dalam Pilkada, seperti program kerja dan kompetensi calon pemimpin. Hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. b). Memicu polarisasi dan fragmentasi masyarakat: Politik identitas dapat memperkuat sentimen primordial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik dan kekerasan antar kelompok (Akbar, 2022)

Studi ini mengkaji mengenai penggunaan kuasa simbolisme yang karena

simbol politik lokal yang memang sangat jarang terjadi di Indonesia bahkan sangat sedikit penelitian serupa yang terjadi di Kota Ambon. Alasan selanjutnya ialah adanya identitas yang menggambarkan tentang Agama (Kristen Protestan-Kritesan Katolik- Muslim serta kepercayaan lain), Etnis Ambones-non ambones, dimana gambaran tentang simbol tersebut ikut mempengaruhi proses dan keputusan politik dalam setiap hajatan demokrasi. Disamping itu, adanya segregasi politik menjelang pilkada maupun pada saat pilkada. Penelitian ini menjadi penting melihat dari perspektif demokrasi deliberasi. Deliberasi ini bisa dikatakan sebagai bentuk partisipasi dari bawah. Hal inilah yang disebut dengan istilah *democracy from below* (Alfirdaus, 2016). Demokrasi dari bawah adalah demokrasi yang diprakarsai oleh, di, dan untuk masyarakat, didukung oleh praktik budaya sehari-hari mereka, dan dorongan ditentukan oleh konteks politik mereka sendiri. Terminologi ini dapat disamakan dengan akar rumput demokrasi, demokrasi informal, atau demokrasi sehari-hari, dan merupakan kebalikan dari demokrasi formalistis. Oleh sebab itu kuasa simbolisme politik identitas di Kota Ambon sangat menarik dilihat menggunakan pendekatan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan pokok yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan kuasa simbolisme politik identitas dalam mengembangkan demokrasi deliberatif pada pemilihan Kepala Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah penelitian, langkah selanjutnya adalah menetapkan

tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam disertasi ini yaitu mengeksplorasi bagaimana penggunaan kuasa simbolisme politik identitas dalam mengembangkan demokrasi dan meredakan friksi pada pemilihan kepala daerah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi teoritis untuk kemajuan ilmu pengetahuan dengan area fokus kuasa simbolisme politik identitas dalam pemilihan kepala daerah;
- b. Menerangkan interseksi antara kuasa simbolisme politik identitas dan pemilihan kepala daerah;
- c. Membuka cakrawala baru terkait dampak kuasa simbolisme politik identitas dalam pemilihan kepala daerah baik positif maupun negatif;

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memperkokoh demokrasi pada tingkat lokal khususnya pasca konflik;
- b. Memperkuat *legacy* positif simbolisme politik identitas dalam konteks demokrasi pada aras lokal.